

**PENGUKURAN GATRA SOSIAL BUDAYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kunjungan pada Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)**

Sri Yuliawati

Program Pascasarjana UHAMKA Jakarta
Jl. Gandaria I, Kebayoran Baru
sriyuliawati_60@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan fenomena sosial budaya secara empirik. Metode yang digunakan adalah survai data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan *Fokus Group Discussion* (FGD) sumber data adalah pejabat pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemuda di Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gatra sosial budaya dapat memperkuat ketahanan nasional masyarakat NTT untuk berpacu bersama daerah lainnya di Indonesia. Di propinsi NTT, gatra “Sosial Budaya” termasuk kategori cukup tangguh, gatra “Kerukunan Sosial” dan “Perilaku Sosial” sangat tangguh, gatra “Pendidikan” dan “Kesehatan” termasuk dalam kategori kurang tangguh, “Penyakit Sosial” dan “Ketertiban Sosial” termasuk dalam kategori tangguh, Indikator “Keluarga” dan “Pemberdayaan Perempuan” dalam kategori cukup tangguh.

Kata kunci: *Pengukuran, Gatra Sosial Budaya, Nusa Tenggara Timur (NTT)*

**MEASUREMENT OF SOCIOCULTURAL DIMENSIONS IN
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA
(A Visit to Domestic Strategic Study Activities)**

Sri Yuliawati

Graduate School UHAMKA Jakarta

Jl. Gandaria I, Kebayoran Baru

sriyuliawati_60@yahoo.com

Abstract

This study aimed to investigate sociocultural conditions and phenomena empirically. The data were collected through observations, interviews, and Focus Group Discussion (FGD). The data sources included government officials, traditional leaders, religious figures, community leaders, and youth in the Province of East Nusa Tenggara (ENT). The findings show that sociocultural dimensions are capable of strengthening the national endurance of the ENT society to go along together with other provinces in Indonesia. In the province of ENT, the sociocultural dimensions are moderately strong, the dimensions of social cohesion and behaviors are very strong, the dimensions of education and health are not strong, the dimensions of social pathology and order are strong, and the indicators of family and women's empowerment are moderately strong.

Keywords: *measurement, sociocultural dimensions, East Nusa Tenggara (ENT)*

Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di wilayah Indonesia bagian tengah, merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang berada di tiga kabupaten dan 10 kecamatan. Untuk pengamanan dan pengawasan wilayah perbatasan terdapat 38 pos TNI yang tersebar di tiga kabupaten perbatasan, yang saat ini dilaksanakan oleh Batalyon Infanteri 742/SWY dari jajaran Korem 162/WB Tenggara Barat dan sekian banyak Pos Polisi. Perbatasan laut wilayah Provinsi NTT dengan RDTL dan Australia berada di 7 kabupaten yang meliputi 54 desa di sepanjang pantai. Di Provinsi NTT terdapat lima pulau terluar, dan dari lima pulau terluar hanya satu pulau yang berpenghuni.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan budaya beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Aparat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) mengemukakan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur terdiri atas berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Hal ini merupakan salah satu warisan budaya yang masih berkembang dengan bermacam ragam corak, tenunan tradisional dari masing-masing suku yang memiliki nilai seni yang tinggi. Penduduk provinsi ini sebagian besar beragama Katolik dan Kristen Protestan (90,9%), serta selebihnya beragama Islam (8,8%), Hindu (0,04%), dan Budha (0,08%).

Kondisi seperti ini akan membawa pengaruh terhadap masuknya budaya melalui mobilisasi manusia, masyarakat, dan teknologi komunikasi dan informasi. Namun, karena keterikatan masyarakat antardaerah berbeda kekuatannya, maka terdapat perbedaan mencolok antara masyarakat modern, tradisional, pesisir, nelayan, pelaut, agraris, desa dan kota. Hubungan antarsuku mempunyai potensi munculnya konflik jika ditinjau dari gatra sosial budaya dengan keanekaragaman budaya yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk diketahui “Bagaimanakah kondisi sosial budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

Kajian Teori

Pada dasarnya pengukuran berkenaan dengan proses mengkonstruksi, mengadministrasi, dan menyekor. Dalam hal ini Kerlinger menjelaskan bahwa, “pengukuran ialah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan” (2003: 687). Gronlund berpendapat bahwa, “pengukuran (*measurement*) adalah kegiatan atau proses untuk memperoleh deskripsi numerik dari tingkatan atau derajat karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu (1985: 5).

Pengukuran yang dilakukan pada kajian tulisan ini yaitu pengukuran pada gatra sosial budaya. Kata “sosial” dapat diartikan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai dan norma kebersamaan (Ketahanan Nasional, 2010: 81). Rasa senasib dan sepenanggungan tertib sosial dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Sementara itu, “budaya” adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan pencipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung, penggerak kehidupan yang menghasilkan karya.

Beberapa teori pengukuran gatra sosial budaya yang terdapat dalam beberapa referensi sebagai berikut:

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini lebih menekankan pada keteraturan/order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan/equilibrium. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian/elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Salah satu tokohnya adalah Robert K. Merton yang berpendapat bahwa, “objek analisis sosiologi adalah fakta sosial, seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pe-

ngendalian sosial, dan lain-lain” (Wikipedia, 2010). Penganut teori fungsional ini memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.

2. Teori Konflik

Teori ini dibangun dalam rangka menentang langsung teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralp Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsionalisme struktural yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Teori ini menilai bahwa, “keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan karena adanya pemaksaan/tekanan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa” (Wikipedia). Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa, “konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik” (Wikipedia).

Sementara itu, Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik yaitu: (1) Sebagai alat untuk memelihara solidaritas; (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; (3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi; (4) Fungsi komunikasi, sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan, tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas (Wikipedia, 2010).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori konflik mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri.

Metode Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran gatra sosial budaya yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi yang terkait dengan mendiskusikannya kepada 16 instansi pemerintah, aparat wali kota Kupang, kantor pemerintah provinsi, Polda NTT, Korem, Lantamal dan Lanud di lingkungan NTT. FGD juga melibatkan Kementerian Agama.
2. Dari hasil FGD disepakai gatra sosial budaya dikembangkan menjadi 8 indikator yang meliputi: pendidikan, kesehatan, keluarga, kerukunan sosial, ketertiban sosial, penyakit sosial, pemberdayaan perempuan, dan perilaku sosial.
3. Menyusun kisi-kisi yang memuat 8 indikator lalu dikembangkan menjadi 60 butir pernyataan.
4. Tiap indikator diberi bobot berdasarkan derajat kebermaknaannya. Derajat kebermaknaan dimaksud adalah bobot strategis dari indikator tersebut dalam mendukung dan menggalang gatra sosial budaya. Pemberian bobot terhadap gatra sosial budaya tersebut bersifat kebijaksanaan/*judgement pakar* (Buku Pedoman Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: 2010). Total bobot seluruhnya dalam gatra sosial budaya adalah 100. Konfigurasi bobot penilalan indikator gatra sosial budaya sebagai berikut:

Tabel 1. Gatra Sosial Budaya

No.	Indikator	Bobot Skor	Total
1	Pendidikan	20	
2	Kesehatan	20	
3	Keluarga	10	100
4	Kerukunan Sosial	10	
5	Ketertiban Sosial	10	
6	Penyakit Sosial	10	
7	Pemberdayaan Perempuan	10	
8	Perilaku Sosial	10	

Sumber: Data/Informasi Lapangan Hasil Observasi dan Diskusi Tim SSDN Peserta PPRA XLIV Tahun 2010.

- Menetapkan parameter dengan menggunakan skala model Likert yaitu skala yang memiliki lima option dan mempunyai rentang nilai 1 sampai dengan 5 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Skor Skala Model Likert

No.	ST	T	CT	KT	R
1	5	4	3	2	1

Maksud Tabel 2 di atas yaitu: ST = Sangat Tangguh diberi skor 5, T = Tangguh diberi skor 4, CT = Cukup Tangguh diberi skor 3, KT = Kurang Tangguh diberi skor 2 dan R = Rawan atau Bahaya diberi skor 1. Penyusunan skor didasarkan pada norma dan data historis. (Buku Pedoman Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional: 2010).

- Menyusun instrumen sebanyak 60 butir pernyataan.
- Mengkaji setiap butir pernyataan dan mendiskusikannya dalam Fokus Group Discussion (FGD). FGD terdiri dari 25 orang yang merupakan perwakilan dari beberapa kementerian.
- Revisi instrumen dilakukan beberapa kali dengan cara mendiskusikannya dalam FGD.
- Melakukan perhitungan untuk menarik sebuah kesimpulan. Bobot yang telah ditetapkan ditransformasikan dari satuan kualitatif yaitu rawan atau bahaya, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, sangat tangguh ke dalam satuan kuantitatif yaitu skor 1 sampai 5 sehingga akan diperoleh nilai 1 sampai 100. Selanjutnya nilai ini dikembalikan lagi menjadi nilai kualitatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Rentang Nilai Gatra Sosial Budaya

Nilai Kualitatif	Nilai Kuantitatif	Nilai Gatra Sosial Budaya
Sangat Baik	85 – 100	Sangat Tangguh
Baik	70 – 84	Tangguh
Cukup	55 – 69	Cukup Tangguh
Kurang	40 – 54	Kurang tangguh
Sangat Kurang	< 40	Rawan/Bahaya

Sumber: Modul 3 Bidang Studi Ketahanan Nasional.

10. Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan setiap indikator dan meratakan jumlah nilai dari keseluruhan indikator sehingga dapat diketahui nilai gatra sosial budaya.
11. Dari kesimpulan tersebut diharapkan temuan kajian mengenai gatra sosial budaya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penduduk asli NTT terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah NTT, yaitu: (1) Etnis Helong di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat serta Semau; (2) Etnis Dawan di sebagian wilayah Kupang, Kecamatan Amarasi, Amfoang, Kupang Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Timor Tengah selatan, Timor Tengah Utara, Belu (wilayah perbatasan); (3) Etnis Tetun di sebagian besar Kab. Belu dan wilayah Negara Timor Leste; (4) Etnis Kemak di sebagian kecil Kabupaten Belu dan wilayah Negara Timor Leste; (5) Etnis Marae di sebagian kecil Kabupaten Belu bagian utara dekat dengan perbatasan Negara Timor Leste; (6) Etnis Rote di sebagian besar Pulau Rote dan sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang dan Pulau Semau; (7) Etnis Sabu/Rae Havu di Pulau Sabu dan Raijua serta beberapa daerah di Sumba; (8) Etnis Sumba di Pulau Sumba; (9) Etnis Manggarai Riung di Pulau Flores bagian barat terutama Kan Manggarai dan Manggarai Barat; (10) Etnis Ngada di Sebagian besar Kab Ngada; (11) Etnis Ende Lio di Kabupaten Ende; (12) Etnis Sikka-Krowe Muhang di Kabupaten Sikka; (13) Etnis Lamaholor di Kabupaten Flores Timur meliputi Pulau Adonara, Pulau Solor dan sebagian Pulau Lomblen; (14) Etnis Kedang di Ujung Timur Pulau Lomblen; (15) Etnis Labala di Ujung selatan Pulau Lomblen; (16) Etnis Pulau Alor di Pulau Alor dan Pulau Pantar.

Deskripsi hasil perhitungan atas kajian pengukuran gatra sosial budaya yang meliputi delapan indikator sebagai berikut:

1. Pendidikan

Berdasarkan standar nasional pencapaian angka ketuntasan program wajib belajar 9 tahun, NTT termasuk salah provinsi yang memiliki angka pencapaian ketuntasan terendah dengan prosentasi 69,78% atau jauh di bawah target nasional yaitu 95%. Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) NTT dengan APM Nasional maupun dengan APM provinsi tetangganya yaitu NTB, maka bisa disimpulkan bahwa NTT sangat tertinggal, baik secara total maupun percepatan kenaikan APM tiap tahunnya. Dalam rentang waktu 12 tahun NTT hanya bisa mengangkat APM sekitar 17% yaitu dari 26% ke 43%. Rendahnya APK ketuntasan wajib belajar 9 tahun di NTT dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah: konsentrasi pengembangan kebijakan yang tidak menyentuh titik persoalan dan problem vital kependidikan di NTT. Mulai dari inefisiensi anggaran pendidikan hingga penggerusan anggaran pendidikan oleh oknum-oknum pelaku kebijakan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Pendidikan” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 2,30 yang berarti kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori kurang tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian pemerintah yang sangat serius agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan di era globalisasi ini. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu terus untuk ditingkatkan secara optimal dan simultan.

2. Kesehatan

Selama 5 tahun terakhir ini profil kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa Angka Kesakitan Penduduk atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi yang lama, seperti: ISPA, malaria, diare, TBC, frambusia, filaria, lepra, dan penyakit infeksi yang baru, seperti: HIV AIDS, DBD Dengue. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (*community based data*) menunjukkan penyakit infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan

di Puskesmas dan rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, fenomena ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penyakit Terbanyak di Puskesmas pada Pasien Rawat Jalan

No.	Golongan Sebab Sakit	Jumlah Kunjungan	%
1.	ISPA	996.946	24,47
2.	Malaria	781.56	20,75
3.	Penyakit Kelainan	577.249	15,33
4.	Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan	501.190	13,31
5.	Penyakit Kulit dan Jaringan Sub Kutan	287.263	7,63
6.	Penyakit Virus	190.355	5,05
7.	Penyakit Infeksi pada Usus	189.685	5,04
8.	Penyakit Rongga Mulut	88.607	2,35
9.	Penyakit Infeksi Parasit dan Akibatnya	77.843	2,07
10.	Sebab lain Kebidanan	75.15	2,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2009.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ngada mengatakan bahwa selama enam bulan, atau terhitung sejak Januari sampai Juni 2009, terdapat 28 kasus bayi meninggal di wilayah Kabupaten Ngada. Kematian bayi itu disebabkan karena asposia atau gagal pernafasan, cacat bawaan, infeksi, dan pnemoni. Adapun rinciannya adalah bayi yang meninggal dalam usia 0-7 bulan sebanyak 17 orang, dalam usia 8 sampai 28 hari sebanyak 2 orang, dan yang berusia 1 sampai 2 tahun sebanyak 9 orang. Sementara itu, bayi lahir mati yaitu bayi lahir sudah meninggal dalam kandungan terdata sebanyak 26 kasus.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Kesehatan” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 2,50 yang berarti kondisi kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kategori kurang tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang memadai, sehingga perlu ditingkatkan yang lebih optimal, terutama wilayah perbatasan, terpencil, dan terluar.

3. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan strategis yang sangat besar perannya dalam pembangunan suatu bangsa” (Alex Dimoe: 2010). Lingkungan keluarga merupakan tempat ditumbuhkannya kasih sayang serta sikap dan perilaku hormat-menghormati. Keluarga juga merupakan tempat berlangsungnya interaksi yang harmonis, tempat diajarkannya nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Terkait dengan isu yang terjadi dalam keluarga di tanah air, di antaranya yaitu keretakan hubungan suami istri dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian, dan lain-lain diketahui beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu diidentifikasi sebagai berikut: poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Keluarga” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 3,80 yang berarti kondisi peranan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori cukup tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terbina dengan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan pembinaan yang lebih optimal.

4. Kerukunan Sosial

Brigjen (Pol) Worang (2010) mengatakan bahwa karakter warga NTT terkesan keras, namun tidak gampang terprovokasi oleh tindakan ataupun hasutan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, interaksi sosial masyarakat NTT di bidang sosial budaya cukup kooperatif. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kasus konflik yang terjadi akibat aktivitas masyarakat di bidang sosial budaya.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Kerukunan Sosial” di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendasarkan pada jumlah konflik fisik massal, pekerja, pengusaha, dan antar aparat pemerintah dengan masyarakat diperoleh nilai 5,00 yang berarti kondisi keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori sangat tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan sosial dalam masyarakat telah

terjalin dengan harmonis dan damai sehingga tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu TAHG.

5. Ketertiban Sosial

Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen (Pol) Yorri Yance Worang menegaskan bahwa, “Amannya situasi kamtibmas di wilayah ini karena tingkat kesadaran masyarakat untuk menjadi polisi bagi diri sendiri semakin baik, termasuk partisipasi dalam membina kerukunan dalam lingkungan tempat mereka tinggal”. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat NTT cukup baik dan kondusif. Namun, bila dicermati lebih jauh, data statistik tentang kasus pelanggaran HAM dan kejahatan lain menunjukkan angka yang memprihatinkan. Selanjutnya laporan Kapolda NTT, Brigjen (Pol) Suedi menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan perkembangan gangguan kamtibmas selama tahun 2008 hingga Juni 2009 terdapat kecenderungan menurun secara kuantitas dan meningkat secara kualitas. Artinya, secara keseluruhan kasus kejahatan tersebut mengalami penurunan dari 3,008 menjadi 2,769 atau sekitar 7,94%.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Ketertiban Sosial” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 4,65 yang berarti kondisi ketertiban sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketertiban sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terkendali namun masih perlu diwaspadai tentang TAHG yang dapat muncul, baik yang nasional, regional maupun internasional.

6. Penyakit Sosial

Mamulak (2009) mengatakan bahwa, “Penyakit sosial menghantui warga di Nusa Tenggara Timur”. Oleh karena itu, setiap orang diimbau untuk menciptakan rasa aman mulai dari diri sendiri, keluarga hingga ke lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, Esthon L Foenay, Wakil Gubernur NTT, mengatakan hingga saat ini di wilayah NTT tercatat 578 orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Dari jumlah ini sampai akhir Mei 2009 terdata 241 di antaranya telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil perhitungan pada kajian pengukuran terhadap indikator “Penyakit Sosial” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 4,70 yang berarti kondisi penyakit sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diantisipasi dan diatasi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan itu.

7. Pemberdayaan Perempuan

Hal yang semakin mengurangi akses anak perempuan untuk bersekolah di NTT adalah faktor keamanan, dan adat lokal yang kurang menghargai pendidikan untuk anak perempuan. Selanjutnya, keterwakilan di Lembaga Legislatif laki-laki sebanyak 12 orang (92,3%), sedangkan perempuan = 1 orang (7,7%). Keterwakilan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nasional dan Provinsi hasil pemilu 2009, laki-laki 6 orang (75%), sedangkan perempuan 2 orang (25%).

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Pemberdayaan Perempuan” di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 3,00 yang berarti kondisi pemberdayaan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori cukup tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pemberdayaan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup baik, namun hal ini masih perlu terus ditingkatkan agar kontribusi SDM perempuan di berbagai bidang dapat seimbang dengan laki-laki dan tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki karena perempuan pun dapat berbuat dan bekerja dengan kualitas yang optimal.

8. Perilaku Sosial

Tipikal manusia di Nusa Tenggara Timur lebih menunjukkan perilaku ke arah pola hidup konsumtif dan bukan ke arah pola hidup produktif. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pengkajian empirik yang diambil dari Tabel *Input-Output* Nusa Tenggara Timur 2009 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator “Perilaku Sosial” di provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh skor 5,00 yang berarti kondisi perilaku sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori sangat tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak tergoyahkan dengan datangnya pengaruh negatif, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar.

Untuk lebih jelasnya tentang hasil perhitungan pengukuran gatra sosial budaya tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Konfigurasi Nilai Gatra Sosial Budaya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010

No.	Indikator	Tolok Ukur Gatra Sosial Budaya				
		ST	T	CK	KT	R/B
1.	Pendidikan				2,30	
2.	Kesehatan				2,50	
3.	Keluarga			3,80		
4.	Kerukunan Sosial	5,00				
5.	Ketertiban Sosial		4,65			
6.	Penyakit Sosial		4,70			
7.	Pemberdayaan Perempuan			3,00		
8.	Perilaku Sosial	5,00				
	Rata-rata			3,54		

Simpulan

Gatra Sosial Budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori cukup tangguh. Hal ini didukung oleh kondisi kerukunan sosial dan perilaku sosial masyarakat yang sangat tangguh serta didukung pula oleh kondisi ketertiban sosial dan penyakit sosial yang tangguh. Di samping itu, faktor kondisi keluarga dan pemberdayaan perempuan yang cukup tangguh, sehingga dapat mewujudkan kondisi sosial budaya yang cukup tangguh.

Namun, di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam kondisi yang kurang tangguh, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan, terutama oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD). (2008). Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bhoko, Ngada, Hildegardis F. (2009). *Potret NTT*. Nusa Tenggara Timur. Dinkes Kupang.
- Copyright Sekretariat Negara republik Indonesia. All rights reserved. (2008). *Sosial Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Nusa Tenggara Timur: Sekretariat Negara republik Indonesia.
- Denaswara, Deni. (2009). *Waspadai Penyakit Sosial*. Kupang: Kompas.com.
- Dimoe, Alex. (2010). *Keluarga Jadi Basis Pembangunan Masyarakat*. Nusa Tenggara Timur: Dialog Interaktif dan Pertunjukan Seni Tradisional.
- Foenay, Esthon L. (2009). *Waspadai Penyakit Sosial*. Nusa Tenggara Timur: Antara.
- Goegle. (2009). *Wilayah Layanan Nusa Tenggara Timur: Flores, Sumba, Alor Pantar, Timor Barat*. Nusa Tenggara Timur.
- Goegle. (2010). *Situasi Kamtibmas di NTT Kondusif*. Nusa Tenggara Timur.
- Hans. (2008). *Masyarakat NTT Berperilaku Konsumtif*. Nusa Tenggara Timur: Goegle.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*: Penerjemah Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2010). *Buku Pedoman Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional*. Jakarta: Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional.
- Mamulak, Yoseph Aman. (2009). *Penyakit Sosial Masyarakat. Nusa Tenggara Timur: Antara*.
- Paparan Danrem 161/Wira Sakti di Kupang Nusa Tenggara Timur tanggal 24 Agustus 2010.
- Ritzer, George. (2010). *Wikipedia: Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda karangan*. Yogyakarta: Sanggar Kehidupan.
- Suedi, A. Bambang. (2009). *Penyakit Sosial Hantui Masyarakat Kupang*. Nusa Tenggara Timur: antaranews.com.
- Tim Pokja Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional. (2010). *Panduan Belajar Bidang Studi/Materi Pokok Ideologi*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- _____. (2010). *Bidang Studi/Materi Pokok Ketahanan Nasional Modul 3 Sub. B.S Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Worang, Yorri Yance. (2010). *Situasi Kamtibmas di NTT Kondusif*. Kupang Nusa Tenggara Timur: Goegle.
- Zulka, Arvino. (2009). *Penyakit Sosial Hantui Masyarakat Kupang*. Kupang: Antara.